Tinjauan Yuridis Terhadap Penarikan Kendaraan Konsumen Secara Paksa Ditinjau dengan Pasal 368 KUHP

Luthfia Qurrota Aina*, Dini Dewi Heniarti

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*luthfiaina21@gmail.com, diniheniarti@unisba.ac.id

Abstract. Leasing is a company that embodies an agreement that provides financing in the form of goods that become a fiduciary guarantee by the company for use by consumers within a certain period of time with periodic payments. The financing institution cooperates with the Debt Collector service in terms of billing when the debtor does not pay according to what was agreed. The limits of debt collectors are often questioned, because in fact many things are associated with threats and violence. Therefore, this study aims to determine the juridical review of the forcible withdrawal of consumer vehicles associated with Article 368 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical law research using analytical descriptive research specifications, the research stage used is library research, data sources and data collection techniques used are library studies using secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, as well as the data analytical method used by the systematic interpretation method. Theories and rules regarding legal protection in the perspective of victimization to consumers can be judged to be correct, but in the field facts that occur, victims still do not get the sense of security provided by law because they are still receiving threats given by the Debt Collector in the forced withdrawal procedure. The criminal sanctions imposed on the forced withdrawal of vehicles with threats of violence have not been fully implemented in accordance with Article 368 of the Criminal Code. This was due to the lack of attention from the government and the victim himself so that the case was not dealt with in accordance with the provisions.

Keywords: *Debt Collector, Legal Protection, Vehicle Towing.*

Abstrak. Leasing merupakan perusahaan yang mewadahi suatu perjanjian yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk barang yang menjadi jaminan fidusia oleh perusahaan untuk digunakan oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Pihak lembaga pembiayaan bekerja sama dengan jasa Debt Collector dalam hal penagihan ketika debitur tersebut tidak membayar sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Batasan debt collector pun sering kali dipertanyakan, karena pada faktanya banyak hal yang dikaitkan dengan ancaman dan kekerasan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penarikan kendaraan konsumen secara paksa dikaitkan dengan Pasal 368 KUHP. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan, sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta metode analitis data yang digunakan metode penafsiran sistematis. Teori dan aturan tentang perlindungan hukum dalam perspektif viktimologi terhadap konsumen dapat dinilai sudah betul, namun dalam fakta lapangan yang terjadi, korban masih belum mendapatkan rasa aman yang diberikan oleh hukum karena masih mendapatkan ancaman yang diberikan oleh Debt Collector dalam prosedur penarikan paksa. Sanksi pidana yang diberikan terhadap penarikan paksa kendaraan dengan ancaman kekerasan belum sepenuhnya dijalankan sesuai pasal 368 KUHP. Hal itu disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dan korban itu sendiri sehingga kasus tersebut tidak ditindak sesuai dengan ketentuan.

Kata Kunci: *Debt Collector, Perlindungan Hukum, Penarikan Kendaraan.*

A. Pendahuluan

Pada era globalisasi ini, perkembangan ekonomi dan teknologi yang berkembang pesat pada salah satu bidang yaitu alat transportasi, kebutuhan dalam berkendara dari tiap-tiap jarak merupakan salah satu kebutuhan sekunder dalam kehidupan, dengan berkembangnya teknologi transportasi juga dapat mendorong gaya hidup hedonisme yang timbul di tengah masyarakat, baik dari masyarakat yang berstatus ekonomi keatas sampai status ekonomi kebawah. Namun, rendahnya daya beli masyarakat terhadap kebutuhan kendaraan ini memiliki kesenjangan dana.

Hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para produsen dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian kendaraan, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu. Para produsen kendaraan bekerja sama dengan leasing atau lembaga pembiayaan. Leasing atau lembaga pembiayaan umumnya bekerja sama dengan produsen (dealer) kendaraan dimana pada tahap selanjutnya leasing atau lembaga pembiayaan tersebut yang akan membiayai pembelian kendaraan sepeda motor konsumen.

Leasing merupakan perusahaan yang mewadahi suatu perjanjian yang menyediakan pembiayaan dalam bentuk barang yang menjadi jaminan fidusia oleh perusahaan untuk digunakan oleh konsumen dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala. Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Terkait dengan lembaga pembiayaan, pada umumnya apabila pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan perjanjian kredit, maka sebelum dilakukannya eksekusi jaminan, pihak debitur harus dinyatakan wanprestasi. Tetapi, kreditur harus melakukan somasi terlebih dahulu yang menyatakan agar debitur memenuhi prestasinya. Apabila debitur tetap tidak dapat memenuhi prestasinya, maka kreditur dapat menggugat debitur atas dasar wanprestasi, bilamana pengadilan memutuskan debitur telah wanprestasi, maka kreditur dapat melakukan eksekusi atas barang jaminan yang diberikan oleh debitur.²

Kreditur tidak berhak mengambil secara paksa kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia secara sepihak. Hal ini diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, dalam putusan tersebut mengatakan bahwa, “Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya cidera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri.”

Pihak lembaga pembiayaan bekerja sama dengan jasa Debt Collector dalam hal penagihan ketika debitur tersebut tidak membayar sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Batasan debt collector pun sering kali dipertanyakan, karena pada faktanya banyak hal yang dikaitkan dengan ancaman dan kekerasan.³

Meski belum ada ketentuan hukum yang secara khusus mengatur kekerasan dalam hal penagihan, tindakan dengan kekerasan ini dapat dijerat dengan pasal pemerasan yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang mengatakan bahwa “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagaiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Kedudukan korban dalam KUHP belum optimal dibandingkan dengan kedudukan pelaku, karena hanya memihak kepada pelaku. Terkhusus lagi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan ini telah diatur dalam UU PSK, selain itu perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak dapat dilepaskan perannya dari viktimologi.³

Bahwa dalam salah satu contoh penarikan Kendaraan, Korban merasa sangat keberatan dan tidak kuat menerima intimidasi dan rasa malu dengan tetangga terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas tagih atau debt collector yang dikirimkan oleh pihak Pelaku yang

seringkali melakukan intimidasi, yaitu dengan cara bolak-balik mendatangi rumah Korban dengan sikap yang kasar sehingga menciptakan perasaan takut serta rasa malu bagi Korban dan Keluarga Korban, serta telah merusak kredibilitas Korban di lingkungan sekitar tempat Korban Tinggal.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana perlindungan hukum dalam perspektif viktimologi terhadap konsumen?” dan “Bagaimana sanksi pidana yang diberikan terhadap Debt Collector yang melakukan penarikan paksa kendaraan dengan ancaman kekerasan?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen dalam perspektif viktimologi terhadap konsumen;
2. Mengkaji dan menganalisis sanksi pidana yang diberikan terhadap Debt Collector yang melakukan penarikan paksa kendaraan dengan ancaman kekerasan.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, yaitu Pasal 368 KUHP, secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti melakukan kajian bagaimana sanksi pidana yang diberikan terhadap Debt Collector yang melakukan penarikan paksa kendaraan dengan ancaman kekerasan. Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan library research, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dikumpulkan secara sistematis yang kemudian di analisis dengan menggunakan data kualitatif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Perlindungan Hukum dalam Perspektif Viktimologi Terhadap Konsumen

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum⁸.

Bahwa upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban masih belum terjamin dikarenakan masih cukup banyak masyarakat yang merasa tidak aman dan merasa takut atas ancaman yang terjadi pada saat penarikan kendaraan secara paksa oleh Debt Collector atau pihak leasing ketika korban mengalami kredit macet.

Korban adalah orang-orang yang secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk pelukaan fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian atau penurunan substansif hak-hak dasarnya, melalui tindakan-tindakan omisi (tidak melaksanakan yang melanggar hukum pidana yang berlaku pada negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang merumuskan penyalahgunaan kekuasaan sebagian kejahatan.⁹

Bahwa korban penarikan paksa kendaraan yang dilakukan oleh Debt Collector atau Leasing pada saat terjadinya kredit macet yang di alami oleh korban, tidak jarang menggunakan cara ancaman kekerasan atau kekerasan sekalipun, cara ini dianggap dapat menakut-nakuti korban dan dapat dengan mudah untuk korban memberikan kendaraan yang menjadi jaminan fidusia.

Hal ini dapat membuat korban merasakan penderitaan emosional, membuat korban merasa ketakutan, kecemasan, kegelisahan, menyalahkan diri, marah, malu dan terjadi pelukaan mental atau rasa trauma yang dapat dialami korban oleh kejadian tersebut. Bahwa pada saat

penarikan paksa kendaraan terjadi, seharusnya korban pun mengetahui hal apa yang harus dilakukan sebagai pihak korban/debitur bilamana terjadi penarikan paksa kendaraan agar proses penarikan paksa kendaraan berjalan dengan sesuai prosedur yang berlaku.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.”

Bahwa dalam peraturan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020, dalam putusan tersebut mengatakan bahwa, “Penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri, sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya cedera janji (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri.”

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Bab III mengenai Hak dan Kewajiban dalam Pasal 4 huruf (a) berbunyi: “Hak Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Bahwa, artinya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa tiap-tiap konsumen berhak memiliki hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi suatu jasa.

Sedang dalam perspektif viktimologi, menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 angka 3 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Perlindungan hukum dari segi macamnya dapat di bedakan antara perlindungan hukum yang bersifat aktif dan perlindungan hukum yang bersifat pasif. Perlindungan hukum yang bersifat pasif berupa tindakan-tindakan luar (selain proses peradilan) yang memberikan pengakuan dan jaminan dalam bentuk pengaturan atau kebijaksanaan berkaitan dengan hak-hak pelaku maupun korban. Sedangkan, perlindungan hukum yang bersifat aktif berupa tindakan yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak-haknya.

Pada dasarnya, korban bisa mendapatkan perlindungan hukum lewat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terlebih viktimologi pun mendukung perlindungan hukum tersebut lewat teori-teori dan aturan yang ada didalamnya. Dan dalam kasus antara Debt Collector dan korban, tidak jarang Debt Collector melakukan hal yang diluar batasnya karena menganggap kekerasan juga membuat korban merasa terintimidasi merupakan jalan keluar yang paling cepat agar korban bisa cepat memberikan barang jaminan secara sukarela.

Analisis Sanksi Pidana yang Diberikan Terhadap Debt Collector yang Melakukan Penarikan Paksa Kendaraan dengan Ancaman Kekerasan

Perbuatan Pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum, untuk melindungi masyarakat dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Dalam Konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak

pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹⁰

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹¹ Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana merupakan sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.¹²

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹³

Menurut Andi Hamzah, delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*), maksudnya kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III¹⁴.

Tindak pidana perampasan dapat dijerat oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 ayat (1) yang mengatakan bahwa, "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."

Menurut rumusan dalam KUHP bahwa tindak pidana pemerasan ini selain ada ketentuan umumnya (bentuk pokoknya), ada pula bentuk-bentuk khususnya. Pemerasan dalam bentuk pokok Berdasarkan rumusan Pasal 368 (1) sebagai rumusan dari pengertian pemerasan itu terdapat unsur-unsur:

1. Unsur-unsur objektif:
 - a. Perbuatan memaksa;
 - b. Yang dipaksa: seseorang;
 - c. Upaya memaksa dengan: Kekerasan, dan/atau Ancaman kekerasan;
 - d. Tujuan, sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu:
 - i. Orang menyerahkan benda;
 - ii. Orang memberi hutang;
 - iii. Orang menghapus piutang.
2. Unsur-unsur subjektif, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain.

Dengan melawan hukum. Empat unsur objektif dari pemerasan yakni pertama, perbuatan memaksa (*dwingen*). Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan (aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan) yang sifatnya menekan (kehendak atau kemauan) pada orang, agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri.

Unsur tindak pidana pemerasan adalah memaksa, menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan. Objek tindak pidana pemerasan berupa benda (barang), utang, dan/atau perikatan. Dari sudut subjektif, sifat melawan hukum yakni terdapat unsur maksud

menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain dan dari sudut objektif terletak pada unsur perbuatan memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan diatur pada Pasal 368 ayat (2) KUHPidana tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya Pemerasan tersebut dilakukan dengan cara mengancam (pengancaman) dimana bentuk pengancamannya berupa ancaman kekerasan. Secara substansi yang merupakan tindak pidana adalah pemerasan, bukan pengancamannya. Sedangkan pengancaman adalah cara untuk melakukan pemerasan¹⁶.

Adapun yang dimaksud ancaman kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani dan kekuatan jasmani ini penggunaannya tidak kecil. Kekerasan dalam pasal ini termasuk didalamnya adalah memukul dengan tangan, menendang dan sebagainya. Unsur ini mensyaratkan bahwa dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan ini, pemilik barang menyerahkan barang tersebut kepada pelaku. Penggunaan kekerasan ini harus berdasarkan niat agar pemilik barang menyerahkan barangnya¹⁷.

Penarikan objek jaminan fidusia/kendaraan secara paksa adalah suatu keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang telah dilakukan oleh seorang manusia, yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan, dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga waktu persetujuan dibuat. Kesemuanya itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, pada saat timbulnya keadaan tersebut¹⁸.

Prosedur yang tepat dalam penarikan objek jaminan fidusia apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi, maka kreditur penerima Fidusia berhak menjual jaminan Fidusia. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menjelaskan ada 3 cara untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia yaitu:

1. Pelaksanaan title eksekutorial;
2. Eksekusi atas kekuasaan penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum;
3. Eksekusi di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima Fidusia.

Berikut beberapa hal yang harus dipahami masyarakat mengenai prosedur penarikan kendaraan bermotor dari debitur oleh perusahaan pembiayaan:

1. Debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi benda jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur/konsumen
2. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia.
3. Petugas yang melakukan eksekusi benda jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia

Dalam praktek pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Debt Collector bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagaimana yang kita ketahui bahwa perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur yaitu perjanjian yang dibuat di bawah tangan, maka untuk melakukan eksekusinya haruslah melalui putusan pengadilan. Dengan penjualan di bawah tangan tidak di dahului oleh pemberitahuan secara tertulis di surat kabar, tetapi langsung dicari peminatnya oleh debitur, maka eksekusi dinyatakan batal demi hukum. Karena apabila melakukan eksekusi dengan jasa Debt Collector dan penjualan terhadap objek jaminan Fidusia tanpa adanya kesepakatan tentu hal ini bertentangan dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kepolisian Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan dari diterbitkannya peraturan tersebut adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan debt collector dapat dikenakan ketentuan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana KUHP tentang pencurian atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) KUHP yang didalamnya terkandung sanksi

hukum (pidana) yang dapat dilekatkan. Yang dimaksud dengan sanksi adalah seluruh akibat hukum yang harus ditanggung oleh subyek yang didakwa melakukan suatu perbuatan hukum atau menyebabkan terjadinya peristiwa hukum. Dalam hal ini ada dua macam sanksi yang dikenal dalam kajian sosiologi hukum. Pertama, sanksi restitutif yakni sanksi untuk mengupayakan pemulihan. Kedua, sanksi retributif yakni sanksi untuk melakukan pembalasan.

Bentuk sanksi pidana debt collector dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 368 KUHP, dengan penjelasan sebagai berikut:

Adanya pemerasan, dengan ketentuan:

1. Yang dinamakan pemerasan:
 - a. Pemaksaan terhadap subjek hukum;
 - b. Pengambilan barang baik sebagian maupun seluruhnya;
 - c. Adanya unsure menguntungkan diri sendiri.
2. Pemaksaan dengan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan:
 - a. Memaksa yaitu adanya tindakan ancaman untuk melakukan sesuatu;
 - b. Adanya unsur melawan hak.

Secara teori dan pelaksanaan, bahwa teori hukum terhadap penarikan kendaraan konsumen secara paksa oleh Debt Collector ini sudah betul namun kurang efektif. Karena, masih cukup banyak fakta dilapangan bahwa Debt Collector masih tidak menggunakan ketentuan ketentuan yang telah ditentukan oleh aturan atau SOP yang berlaku.

Padaahal, masih banyak metode yang dapat ditempuh selain menggunakan ancaman kekerasan atau kekerasan, walaupun memang waktu yang diperlukan akan sedikit lebih lama, tetapi hal itu sebenarnya akan menimbulkan hasil yang win-win solution tanpa ada yang dirugikan salah satunya.

Banyak korban/pengguna lembaga jasa yang ketika terjadinya kredit macet dan dilakukan penarikan oleh pihak lembaga jasa keuangan dan/atau Debt Collector, korban tidak mengetahui apa langkah pertama yang harus dilakukan jika terjadi penarikan paksa atau prosedur seperti apa yang seharusnya terjadi apabila terjadi kredit macet yang mengharuskan adanya penarikan.

Bahwa tidak semua pengguna lembaga jasa keuangan mengetahui dan memahami prosedur yang betul dalam melakukan penarikan kredit macet. Hal ini karena kurangnya literasi dan pemahaman yang diberikan oleh pihak-pihak yang berwajib dalam hal ini, seperti otoritas jasa keuangan dan kepolisian, serta pihak terkait seperti lembaga jasa keuangan itu sendiri.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Teori-teori dan aturan tentang perlindungan hukum dalam perspektif viktimologi terhadap konsumen dapat dinilai sudah betul, namun dalam fakta lapangan yang terjadi, korban masih belum mendapatkan rasa aman yang diberikan oleh hukum karena masih mendapatkan ancaman-ancaman yang diberikan oleh Debt Collector dalam prosedur penarikan paksa, dengan dalih korban akan memberikan barang jaminan dengan sukarela dikarenakan rasa takut yang didapatkan dari hasil ancaman yang diberikan oleh Debt Collector.
2. Sanksi pidana yang diberikan terhadap debt collector yang melakukan penarikan paksa kendaraan dengan ancaman kekerasan belum sepenuhnya dijalankan sesuai Pasal 368 KUHP. Hal itu disebabkan kurangnya perhatian pemerintah dan korban itu sendiri sehingga kasus tersebut tidak ditindak lanjuti sesuai dengan Pasal 368 KUHP atau bahkan hanya selesai secara kekeluargaan. Dimana dengan diselesaikan secara kekeluargaan pun sudah cukup baik, namun tidak dapat membuat pelaku jera.

Acknowledge

Pada kesempatan ini dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H.. selaku pembimbing yang telah memberikan kesabaran dan ketulusannya dalam memberi petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, ditengah kesibukannya telah

meluangkan waktu. Rasa syukur tidak henti-hentinya saya panjatkan kehadirat Allah Swt, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH.,MH., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Dr. Efik Yusdiansyah, S.H.,M.H.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
3. Bapak Eka An Aqimmudin, S.H.,M.H.. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H.,M.H.. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H.,M.H.. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
6. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Universitas Islam Bandung
7. Ibu Dr. Yeti Sumiyati, SH., MH. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga awal penulisan skripsi yang selalu memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H selaku penguji sidang terimakasih atas masukan-masukan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staf Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan ini.

Daftar Pustaka

- [1] S.M Imaculata, Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan, *Jurnal Rechtsens*, Vol.9, 2020
- [2] Adi Condro Bawono, Apasih Somasi Itu, *Hukum Online*, 2012
- [3] Hadi Prasetyo, Penegakkan Hukum Terhadap Debt yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau dari Pasal 26 Uu No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi, *Prosiding Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung*, Vol 7 No.2, 2021.
- [4] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normative (suatu tujuan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- [5] Red, Wajib Dibaca 6 Tips Dasar Penelitian Hukum, *Hukum Online.com*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57398fe1dc462/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum/> (diakses pada tanggal 25 September 2021 pukul 23.34 WIB)
- [6] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- [7] Newburn T, *Criminology*, Portland, Willan Publishing, 2007.
- [8] Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- [9] Roeslan Saleh, 1990, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- [10] Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006.
- [11] P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- [12] M Kenny A, *Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 Kuhp*, *Lex Crimen* Vol. VIII/No. 3/Maret/2019.
- [13] P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta 2017.
- [14] http://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/72336_1/prosedur-penarikan-kendaraan-ini-hal-yang-perlu-dicermati-nasabah (diakses tanggal 26 November 2021 pukul 15.51 WIB)
- [15] I.K Reymond, *Pengambilan Paksa Atas Barang Orang Lain Oleh Debt Collector Ditinjau dari Pasal 362 KUHP*, *Lex Crimen*, Vol VII, 2018.
- [16] Rina Perwitasari, dkk, *Analisis Yuridis Pengambilan Secara Paksa Kendaraan Debitur yang Wanprestasi oleh Perusahaan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PPU-XVII/2019 Dalam Perspektif Hukum Pidana*, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2021.